MATERI REGULASI · BPR & BPRS

UU P2SK (Omnibus Sektor Keuangan)

UU | Nomor 4/2023 | Tahun 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

✓ Berlaku

Berlaku sejak 12 Januari 2023

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

UU omnibus yang mengubah banyak UU sektor keuangan, termasuk nama baru BPR/BPRS, kegiatan BPR, dan tugas baru LPS.

KENAPA ATURAN INI ADA

UU 4/2023 memakai metode omnibus untuk menyelaraskan aturan di banyak UU sektor keuangan, a.l. UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU LPS, dan UU PPKSK. Diundangkan 12 Januari 2023.

Untuk: BPR & BPRS

Topik: omnibus sektor keuangan; nama baru BPR/BPRS

Berlaku sejak 12 Januari 2023

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Nama "Bank Perkreditan Rakyat" dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat"; "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah".

Pasal 314 Sumber: peraturan.go.id

2 Perubahan nama BPR/BPRS dilakukan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan.

Pasal 314 Sumber: peraturan.go.id

3 BPR berbadan hukum selain PT atau koperasi diberi waktu paling lama 3 tahun untuk mengubah bentuk badan hukumnya.

Pasal 314 Sumber: peraturan.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Kegiatan BPR diperluas, a.l. transfer dana, penukaran valuta asing, kerja sama dengan LJK lain, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 13 dan 13A UU Perbankan (diubah UU P2SK)

Sumber: peraturan.go.id

5 Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR menyalurkan kredit/pembiayaan bagi UMKM.

Pasal 15A UU Perbankan (disisipkan UU P2SK)

Sumber: peraturan.go.id

6 Fungsi LPS diperluas: menjamin simpanan, menjamin polis asuransi, ikut menjaga stabilitas sistem keuangan, dan melakukan resolusi bank.

Pasal 4 UU LPS (diubah UU P2SK) Sumber: peraturan.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Pastikan nama, anggaran dasar, dan materi publikasi memakai nomenklatur baru BPR/BPRS.
- Bila badan hukum belum PT/koperasi, ikuti kewajiban perubahan bentuk badan hukum.
- Sesuaikan kebijakan internal dengan perubahan UU Perbankan, UU LPS, dan UU terkait yang diubah P2SK.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Gunakan peluang kegiatan baru (transfer dana, valas, kerja sama) dengan tetap mengikuti aturan OJK pelaksananya.

Legal

Periksa akta, anggaran dasar, dan perjanjian agar memakai nama dan bentuk badan hukum sesuai P2SK.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Petakan aturan internal yang merujuk pasal lama UU Perbankan/UU LPS dan perbarui rujukannya.

Dewan Komisaris

Pantau tindak lanjut perubahan nama dan badan hukum sampai tuntas.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Omnibus

Satu UU yang sekaligus mengubah banyak UU lain.

BPR / BPRS

Kini kepanjangannya Bank Perekonomian Rakyat / Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Apa kepanjangan BPR setelah UU P2SK?

JAWABAN

Bank Perekonomian Rakyat.

TANYA 2

Berapa lama batas waktu perubahan nama BPR/BPRS?

JAWABAN

Paling lama 2 tahun sejak UU P2SK diundangkan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku; diundangkan 12-01-2023. Katalog mencatat ada UU 4/2026 tentang Perubahan atas UU 4/2023 (lihat cek manual #4).

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah PDF di peraturan.go.id adalah hasil pindai; kutipan pasal perlu dicocokkan ulang dengan naskah teks bila tersedia.
- Isi UU 4/2026 (perubahan atas UU P2SK) dan dampaknya ke BPR/BPRS belum dibaca.
- Bagian P2SK lain yang relevan bagi BPR (mis. konsumen, pelaporan) belum diringkas karena keterbatasan ruang slide.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

peraturan.go.id
https://peraturan.go.id/id/uu-no-4-tahun-2023

peraturan.go.id
https://peraturan.go.id/files/uu-no-4-tahun-2023.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.